TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO)

Zuhrah

Husnatul Mahmudah

Juhriati

STIH Muhammadiyah Bima

Jl. Anggrek Nomor 16 Ranggo Na'e Kota Bima

zhoemachy@gmail.com

arraynez@gmail.com

juhriati@stihm-bima.ac.id

Abstrak

Perkawinan yang menjadi lembaga pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan tidak harus selalu dipandang sebagai wadah ibadah kepada sang pencipta. Tetapi ada hubungan kemanusiaan yang juga perlu dijaga dimana antara suami dan istri harus diberi perlindungan yang sama dalam hal pembagian harta bawaan apabila terjadi perceraian. Oleh masyarakat Belo dibuat sebuah perjanjian perkawinan dalam bentuk yang berbeda yakni perjanjian perkawinan di bawah tangan atau tidak tertulis dengan dalih meneruskan tradisi nenek moyang yang telah lama hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut sifatnya lisan yakni ucapan kedua keluarga ketika bertemu untuk menyepakati komitmen menyatukan keluarga beserta harta yang akan dibawa oleh masing-masing pihak. Ucapan tersebut juga memiliki akibat hukum bagi pihak suami maupun istri, karena meskipun sifatnya lisan tetap

menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.

Keywords: *Perkawinan, Tradisi, Akibat Hukum, Masyarakat.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan lembaga untuk melegitimasi hubungan laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam semua agama, perkawinan merupakan peristitwa sakral yang berdasar pada nilai teologi sehingga asas dasar perkawinan adalah monogami. Sebagai sesuatu yang sifatnya sakral, perkawinan baru bisa berjalan bila sudah dipenuhi rukun dan syarat sahnya. Semakin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut globalisasi banyak memengaruhi lini kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya termasuk kehidupan berumah tangga.

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan perceraian, karena ujung kisah dari perkawinan yang tidak terselamatkan adalah perceraian. Sehingga dengan peristiwa tersebut para suami maupun istri membuat perjanjian perkawinan sebagai bentuk komitmen untuk saling percaya. Karena tidak sedikit perkawinan yang berujung perceraian mempersoalkan tentang harta yang dimiliki. Di samping itu, banyak yang tidak mengetahui adanya pemisahan harta yang berasal dari harta bawaan ketika belum menikah dan harta ketika sudah menikah. Sehingga salah satu dari pasangan tersebut akan mengklaim bahwa harta yang berasal dari bawaan ketika belum dalam ikatan perkawinan juga menjadi harta bersama.

Di sisi lain budaya praktis menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat

¹ Pasal 1 ayat 1 UUP

memasuki jenjang perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai pandangan terhadap harta kekayaan suami istri sebagai akibat dari perkawinan. Akan tetapi perjanjian perkawinan di Indonesia masih dianggap tabu, sensitif, serta kurang etis karena mengingat masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada ajaran Islam dan budaya Timur. Masyarakat cenderung berpikir bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah sebagai proses menyatukan kehidupan antara suami dan istri. Dengan melangsungkan perkawinan, maka meleburlah pula suami dan istri beserta semua hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Maka akan menjadi sangat janggal apabila mengenai hak dan kewajiban dan harta benda diatur secara terpisah dalam sebuah perjanjian perkawinan.²

Dengan kejadian tersebut, muncul perjanjian perkawinan sebagai payung hukum dalam melindungi hak atas harta masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan diatur dalam tiga hukum positif Indonesia, yakni Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kini diubah ke undang-undang nomor 16 tahun 2019. Lalu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang perkawinan pasal 29 ayat (1) hanya mengatur tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan, waktu sah nya perjanjian perkawinan dan dihadapan siapa perjanjian tersebut dibuat. Tetapi muncul permasalahan dalam perkawinan campuran sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusannya sebagai solusi permasalahan tersebut dalam Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 sehingga merubah klausula pasal 29 undang-undang perkawinan menjadi: (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua

² Eko Afrianto, Yaswirman, and Neneng Oktarina, "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Harta Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan" Volume 3 Nomor 2 (2020): hal.201.

belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan; (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Demikian juga dengan KUHPdata pasal 139 dengan jelas menyebutkan bahwa para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Kompilasi hukum Islam sebagai ijtihad para ulama Indonesia mengelaborasi antara klausula dari undang-undang perkawinan dan KUHPdata yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dari segi substansi tidak menyebutkan harta secara spesifik sebagai isi dari perjanjian perkawinan. Tetapi lebih kepada perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang selama ini selalu menjadi korban dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, ditinggalkan dalam waktu cukup lama tanpa kabar berita, dipoligami tanpa izin istri terdahulu, dan sebagainya. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah poligami liar yang dilakukan oleh para prajurit pada masa

kerajaan dahulu. Sehingga perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak hadir sebagai pelindung bagi perempuan.³

Indonesia sebagai negara yang heterogen dengan suku dan adat yang plural menjadikannya sebagai negara unik. Salah satunya adalah adat dalam perkawinan. Bima sebagai salah satu wilayah kecil yang terletak di wilayah tengah Indonesia memiliki ragam tradisi dalam perkawinan seperti *londo iha* (nikah selarian) sebagai bentuk permintaan restu secara paksa karena tidak direstui baik-baik oleh orang tua, tradisi *kaboro co'i*, *mbolo weki*, *teka ra ne'e*, *peta kapanca*, *kalondo wei*, *wura bongi monca*, *tari mpa'a ntumbu tuta* dan masih banyak lainnya. Dalam penelitian ini mengungkap salah satu tradisi unik dimana kebiasaan yang telah mengakar dari para nenek moyang dan diteruskan sampai hari ini yakni tradisi menyediakan pekarangan bagi perempuan dan menyediakan rumah bagi laki-laki ketika berniat untuk menikah. Fokus penelitian ini dilakukan pada masyarakat kecamatan Belo kabupaten Bima. Tradisi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan lisan yang turun temurun. Bukan kesepakatan yang dilaksanakan pada acara perkawinan saat ini. Secara hukum bisa menjadi sebuah permasalahan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah 1) apa makna filosofis pada tradisi menyediakan pekarangan dan rumah dalam perkawinan masyarakat Belo?; 2) Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pekarangan dan rumah yang dibawa ketika terjadi perceraian?

Tujuan penelitian ini adalah menggali tradisi masyarakat yang telah terbiasa dengan kesepakatan lisan tetapi dikhawatirkan berakibat hukum fatal sehingga memicu konflik lain yang melibatkan keluarga besar suami istri yang telah bercerai terkait pembagian harta bawaan.

³ Zuhrah, "Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan" Volume 6 Nomor 1 (2013): hal.6.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris⁴ yang menggali tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Belo dalam melaksanakan perkawinan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dimana mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak.⁵ Tradisi yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Belo tidak memiliki kaidah tertulis melainkan kaidah yang berlaku atas kesepakatan lisan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Nilai Tradisi Menyediakan Pekarangan dan Rumah

Terjadi perbedaan pendapat tentang perjanjian perkawinan yang termuat dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Bila dalam undang-undang perkawinan tidak memasukkan taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, hanya disebutkan bahwa isi perjanjian perkawinan sah apabila tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kompilasi hukum Islam dengan spesifik menyebutkan bahwa taklik talak adalah salah satu dari bentuk perjanjian perkawinan yang mengandung nilai perlindungan bagi perempuan dari diskriminasi laki-laki. Sebagaimana diungkap oleh Khoiruddin Nasution bahwa pelebagaan taklik talak

⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), hal.149.

⁵ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal.26.

dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas negara.⁶

Selain taklik talak, bisa dibuat perjanjian perkawinan lain seperti halnya pemisahan harta. Selama ini paradigma yang terkonstruksi dalam perjanjian perkawinan hanya untuk melindungi perempuan yang kerap menjadi korban, tetapi di era kontemporer terjadi pergeseran dimana laki-laki dan perempuan sama-sama diberi perlindungan dari sisi material. Tradisi menyediakan pekarangan dan rumah adalah bentuk persamaan perlindungan bagi laki-laki dan perempuan meskipun tersirat makna lain yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Masyarakat kecamatan Belo merupakan masyarakat yang terkenal dengan kekentalan keislamannya. Bermata pencaharian sebagai petani bawang terbesar di wilayah kota dan kabupaten Bima. Dengan penghasilan yang cukup besar, menjadikan masyarakat Belo mendominasi sebagai calon Jemaah haji terbanyak setiap tahunnya. Pada masa-masa awal, masyarakat Belo melakukan penanaman bawang di daerah sendiri, tetapi karena seiring pertumbuhan penduduk yang mengurangi ladang menanam untuk perluasan kediaman warga, juga karena penduduk yang semakin banyak sehingga melakukan ekspansi menanam di luar wilayah Belo diantaranya di Sumbawa, Sanggar, Parado, Wera, Lambu yang disesuaikan dengan relief tanah yang cocok untuk menanam bawang. Karena tidak semua jenis tanah bisa ditanami bawang.

⁶ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan" Volume XXXI No.70 (Desember 2008): hal.335.

Sejarah tradisi menyediakan pekarangan dan rumah beriringan dengan sejarah cocok tanam bawang masyarakat Belo. Dengan penghasilan bawang sebagai kebutuhan pokok rumah tangga juga yang mendorong masyarakat Belo untuk menyepakati tradisi menyediakan rumah dan pekarangan tersebut. Pantang menikah sebelum modal hidup tercukupi. Dalam istilah masyarakat Bima *kaniki sawatipu da nika* yang artinya mempersiapkan segala sesuatu sebelum perkawinan dilangsungkan. Ibarat peperangan yang harus menyediakan senjata untuk berperang.

Berdasarkan penuturan dari salah satu responden yang merupakan tetua di desa Soki mengatakan bahwa sejarah dari tradisi menyediakan pekarangan dan rumah telah ada sejak masyarakat mendiami wilayah Belo tersebut. Era tahun 1960-an orang tua dari narasumber juga telah melanjutkan tradisi tersebut, yang artinya bahwa sejak Indonesia dijajah, wilayah Belo telah ditempati oleh warga dan telah memiliki tradisi menyediakan pekarangan dan rumah. Unikny lagi bahwa tradisi ini hanya berlaku jika pasangan yang menikah adalah sesama warga Belo dan apabila pihak laki-laki merupakan warga Belo meski menikah dengan perempuan yang bukan masyarakat Belo tetap menyediakan rumah bagi istri. Untuk pekarangan, atas kesepakatan bersama bisa urunan untuk pembeliannya atau secara utuh dibeli oleh pihak laki-laki sebagai bentuk pertanggungjawaban suami mengayomi istri dan anak-anaknya kelak. Wilayah yang termasuk dalam kecamatan Belo adalah Cenggu, Runggu, Roka, Renda, Ngali, Lido, Soki, Ncera, Diha.⁷

Nilai yang terkandung dalam tradisi menyediakan rumah dan pekarangan telah jelas dimana masing-masing pihak baik suami maupun istri ingin mempertahankan apa yang menjadi haknya, yakni pekarangan beserta isi rumah adalah kepemilikan

⁷ Ruslan, Sejarah Tradisi Menyediakan Pekarangan dan Rumah Masyarakat Belo, November 8, 2021.

istri dan rumah adalah milik suami. Terkecuali jika pihak laki-laki menyebutkan bahwa rumah adalah mahar kepada istri. Konsep perjanjian perkawinan yang dilakukan secara lisan tersebut bukan tanpa alasan, karena selain sebagai modal awal untuk putra putri yang akan menikah juga karena telah banyak pelajaran yang terjadi dalam masyarakat bahwa salah satu pihak mengambil alih semua harta yang awalnya dibawa masing-masing suami maupun istri.

Di samping itu, nilai strata sosial yang membuat masyarakat Belo untuk gengsi jika anak-anak mereka akan melangsungkan perkawinan dan tidak bisa menyediakan pekarangan atau rumah. Meskipun keadaan ekonomi tidak lebih dari cukup, tetapi untuk sebuah tradisi harus ditunaikan. Sehingga kebiasaan masyarakat Belo, ketika melahirkan anak-anak mereka dan sudah jelas jenis kelaminnya maka sedari kecil anak-anaknya mengumpulkan dana sedikit demi sedikit untuk membeli pekarangan dan rumah yang akan diperuntukkan bagi anak-anak mereka kelak. Berbeda dengan keluarga yang serba berkecukupan, tanpa harus mempersiapkan dana dari awal, ketika menjelang hari perkawinan anak-anak mereka tinggal membeli apa yang menjadi kebutuhan.

Makna Filosofis dan Hipotesa Tradisi Menyediakan Pekarangan dan Rumah Sebagai Perjanjian Perkawinan Tidak Tertulis

Ibarat ladang yang berfungsi untuk ditanami tanaman dan bibit yang menjadi benih tanaman adalah rasionalisasi dari tradisi menyediakan pekarangan dan rumah. Perempuan adalah sebagai ladang untuk bercocok tanam sedangkan laki-laki adalah benih untuk ditanami di ladang. Padahal sebenarnya bisa saja perempuan menyediakan rumah beserta isinya dan laki-laki

menyediakan pekarangan. Tetapi dalam pemaknaan masyarakat Belo bahwa tradisi tersebut sesuai dengan kodrat masing-masing.

Di samping itu, perkawinan yang merupakan ibadah terpanjang⁸ harus menyiapkan bekal baik mental maupun materi. Para orang tua yang telah berpengalaman mengarungi bahtera rumah tangga tentu paham dan tahu apa saja yang menjadi bekal perjalanan berumah tangga. Sebagai manusia tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan yang memenuhi aspek kehidupan, seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.⁹ Dilihat dari piramida yang digambarkan oleh Maslow, kebutuhan fisiologis mengambil bagian besar karena kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan fundamental yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Dalam istilah ekonomi disebut sebagai kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yakni pakaian, makanan dan tempat tinggal.

Para orang tua dalam masyarakat Belo tidak menginginkan anak-anaknya kebingungan dalam membangun rumah tangga. Ketika sudah ada komitmen untuk menikahkan anak-anaknya maka pihak keluarga laki-laki sudah memulai membangun rumah atau menyiapkan modal untuk membeli rumah. Rumah tersebut haruslah rumah kayu meski tidak ditentukan seberapa besar rumah yang dibawa karena ketika sudah dilangsungkan perkawinan akan ada prosesi gotong royong angkat rumah baru dari pihak laki-laki untuk ditempatkan ke pekarangan yang disediakan perempuan. Begitu juga pihak perempuan, menjelang perkawinan maka orang tuanya berkewajiban menyediakan

⁸ Iklima Nur Azizah, *Merangkai Kisah Menuju Sakinah* (Jawa Barat: CV Jejak, n.d.), hal.75.

⁹ Widayat, *Menyibak Hierarki Kebutuhan Masyarakat Virtual* (Malang: UMM Press, 2021), hal.11.

pekarangan ditambah dengan isi rumah seperti difan, lemari pakaian, sofa duduk, perabotan dapur, dan lainnya.¹⁰

Rumah dan pekarangan adalah modal awal menuju kehidupan yang panjang, dilakukannya tradisi ini untuk membentuk anak-anak mereka menjadi mandiri. Artinya pasangan suami istri baru tidak lagi bergantung pada orang tua dan mulai memikirkan untuk mencari nafkah bagi suami dan menjalankan tugas dan kewajiban bagi si istri. Meskipun dengan segala keterbatasan skill dimana mata pencaharian masyarakat Belo rata-rata petani, dengan adanya rumah sendiri membantu meminimalisir pengeluaran untuk kebutuhan rumah yakni mengontrak rumah atau kos-kosan.

Tradisi menyediakan rumah dan pekarangan tersebut hanya atas dasar kesepakatan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu. Sifatnya hanya melanjutkan tradisi karena sifatnya positif dan untuk kebaikan bersama. Jika mengacu pada regulasi tentang perjanjian perkawinan secara normatif maka sifatnya harus tertulis atau hitam di atas putih dan dilakukan di depan pegawai pencatat nikah atau notaris. Dengan demikian maka konsekuensinya jelas dalam hal pembagian harta.

Selain memperjanjikan hak asuh anak, hak nafkah anak atau lainnya, tetapi kebanyakan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini selalu terkait dengan pembagian harta. Harta yang dimaksud adalah 1) harta bawaan masing-masing suami dan istri yang merupakan hibah, hadiah atau warisan dari orang tua atau keluarga; 2) Harta yang didapat oleh suami atau istri ketika masih bujang dan perawan; 3) Harta yang diperoleh ketika sudah dalam ikatan perkawinan tanpa mengurangi hak dan kewajiban baik suami maupun istri.

Model tradisi masyarakat Belo yang menyediakan pekarangan dan rumah merupakan konsep perjanjian

¹⁰ Arsyad, Makna Filosofis Tradisi Menyediakan Pekarangan dan Rumah Menjelang Perkawinan, November 8, 2021.

perkawinan yang sejatinya tertuang dalam hukum positif (undang-undang perkawinan, KHI dan KUHPerdota). Tetapi secara de facto tidak ditemukan adanya akta perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis yang dilakukan di depan pegawai pencatat nikah ataupun notaris. Tanpa ada permintaan khusus dari kedua belah pihak, secara otomatis masing-masing menyediakan apa yang menjadi kewajiban. Melihat kondisi keluarga pada masyarakat Belo, tidak ada RTM (Rumah Tangga Miskin) seperti istilah Program Keluarga Harapan (PKH) kementerian social RI. Meskipun terlihat rumah orang tuanya yang agak lusuh, tidak menjadikan masyarakat Belo menghindari tradisi perkawinan tersebut.

Tradisi menyediakan rumah dan pekarangan ini bukanlah bagian dari seserahan atau mahar, tetapi lebih kepada kesadaran orang tua yang memberikan modal hidup bagi anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi.

Akibat Hukum Tradisi Menyediakan Pekarangan dan Rumah Pasca Perceraian Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan

Segala bentuk perjanjian adalah mengikat para pihak baik dua atau lebih. Pun perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian karena mengikat dua keluarga besar dalam sebuah kesepakatan yang berkomitmen membangun rumah tangga. Perjanjian dalam bentuk apapun melahirkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan syarat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdota yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.¹¹ Dengan telah memenuhi syarat, artinya perjanjian telah mengikat para pihak dan berlaku bagi

¹¹ Filipp Levin, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d., hal.236.

para pihak sebagai konsekuensi dari perjanjian sebagaimana bunyi pasal 1338 KUHPerdara yakni semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹²

Perjanjian perkawinan juga demikian adanya, bahwa apa yang diperjanjikan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Bentuk perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman pembatalan. Syarat ini dimaksudkan agar perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Selain itu, perjanjian perkawinan yang dibuat di depan lembaga sah hukum memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.¹³

Secara formil, perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.

¹² Levin, hal.238.

¹³ Annisa Istianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung" Volume III Nomor 2 Juli-Desember (2015): hal.47.

Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau isteri yang sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan. Apabila kelak perkawinan tersebut tidak berhasil, maka isteri memperoleh separuh dari milik bersama suami isteri yang sebenarnya hanya terdiri atas harta kekayaan si suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut, kecuali apabila berlaku sebaliknya, yang akan dinikahi adalah yang mempunyai harta kekayaan yang paling banyak. Anak-anak dari perkawinan pertama tersebut tidak dirugikan.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tradisi menyediakan rumah dan pekarangan pada masyarakat Belo merupakan perjanjian perkawinan yang tidak tertulis karena hanya diperjanjikan lewat lisan dan diperjanjikan sebelum perkawinan berlangsung dengan ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh para pihak. Sama halnya dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan secara tertulis dan dibuat di depan pegawai pencatat nikah atau notaris, tradisi menyediakan rumah dan pekarangan sebagai perjanjian perkawinan tidak tertulis masyarakat Belo juga memiliki akibat hukum nyata. Akibat hukum tersebut berlaku jika terjadi perpisahan atau perceraian antara suami dan istri, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Afrianto, Yaswirman, and Oktarina, "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Harta Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan," hal.201.

¹⁵ Syamsidar, and Fujiatin, Akibat Hukum Terhadap Pekarangan dan Rumah Ketika Terjadi Perceraian, November 10, 2021.

1. Terjadi cerai hidup atau cerai dan memiliki anak, maka pekarangan dan rumah akan ditempati oleh istri dan anak. Peruntukan rumah yang tidak diambil kembali oleh suami adalah diperuntukan bagi sang anak;
2. Terjadi cerai hidup dan tidak memiliki anak, maka masing-masing akan mengambil apa yang dibawa ketika perkawinan berlangsung;
3. Terjadi cerai mati dan tidak memiliki anak, maka pihak keluarga turut campur dalam membagi pekarangan dan rumah sesuai yang disediakan;
4. Terjadi penjualan rumah atau pekarangan dalam ikatan perkawinan untuk biaya hidup, lalu terjadi cerai hidup dan tidak memiliki anak, maka yang tersisa antara rumah atau pekarangan akan dibagi dua;
5. Terjadi penjualan rumah atau pekarangan dalam ikatan perkawinan untuk biaya hidup, lalu terjadi cerai mati dan tidak memiliki anak, maka bagi suami atau istri yang meninggal akan diteruskan oleh keluarganya yang masih hidup untuk mengurus pembagian harta bawaan yang tersisa antara rumah atau pekarangan akan dibagi dua;
6. Apabila rumah yang disediakan pihak laki-laki menjadi mahar, ketika terjadi cerai hidup atau mati, punya anak atau tidak maka rumah tersebut mutlak menjadi hak milik istri.

Meskipun telah jelas akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian perkawinan atas nama tradisi, tetapi tetap saja peristiwa tersebut sebagai perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta di bawah tangan karena sifatnya tidak tertulis. Perjanjian kawin yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidak memberikan kepastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, dan masih dapat dibantah. Walaupun diakui, kekuatan pembuktiannya hanya mengikat bagi para pihak saja. Terbukti dengan banyak insiden dimana salah

satu pihak mengklaim bahwa rumah dan pekarangan telah menjadi milik pihak istri atau suami yang mana kondisi perceraian belum memiliki anak.

Simpulan

Perbedaan ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam maupun KUHPerdara hanya pada legalitas perjanjiannya. Bila undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam hanya mengatur bahwa perjanjian itu sifatnya tertulis dan di depan pegawai pencatat nikah, sedangkan KUHPerdara mengatur perjanjian untuk dibuat di depan notaris dalam bentuk akte notaris untuk memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan.

Tradisi menyediakan pekarangan dan rumah merupakan konsep perjanjian perkawinan jika dilihat dari prosedur pembuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan, hanya saja dilakukan secara lisan oleh mempelai beserta keluarga besar. Perjanjian tersebut berlaku asas yang sama dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis sesuai dengan hukum positif Indonesia dengan akibat hukum yang sedikit berbeda. Karena sifatnya lisan, maka bisa saja salah satu pihak merekonstruksi alasan perjanjian apabila pihak yang lain memiliki kelemahan. Sehingga menurut peneliti, baiknya perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis meskipun tidak ke notaris tetapi cukup di depan pegawai pencatat nikah atau saksi di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Afrianto, Eko, Yaswirman, and Neneng Oktarina. "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Harta Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan" Volume 3 Nomor 2 (2020).
- Arsyad. *Makna Filosofis Tradisi Menyediakan Pekarangan dan Rumah Menjelang Perkawinan*, November 8, 2021.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung" Volume III Nomor 2 Juli-Desember (2015).
- Levin, Filipp. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d., 354.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan" Volume XXXI No.70 (Desember 2008).
- Nur Azizah, Iklima. *Merangkai Kisah Menuju Sakinah*. Jawa Barat: CV Jejak, n.d.
- Ruslan. *Sejarah Tradisi Menyediakan Pekarangan dan Rumah Masyarakat Belo*, November 8, 2021.
- Syamsidar, and Fujiatin. *Akibat Hukum Terhadap Pekarangan dan Rumah Ketika Terjadi Perceraian*, November 10, 2021.

Widayat. *Menyibak Hierarki Kebutuhan Masyarakat Virtual*. Malang: UMM Press, 2021.

Zuhrah. *"Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan"* Volume 6 Nomor 1 (2013).